

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pencapaian elektoral pada Partai Golkar tahun 2024 tidak dapat dipahami secara terpisah dari kombinasi dua faktor kausal yang bekerja dengan bobot yang berbeda pada tahapan yang berbeda. Kontribusi paling fundamental dan paling menentukan dari kepemimpinan Airlangga bukanlah strategi kemenangan Pemilu 2024 itu sendiri, melainkan periode konsolidasi krisis pada 2017–2019 yang menjadi *foundational condition* prasyarat dasar yang tanpanya seluruh pencapaian berikutnya tidak akan memiliki pondasi untuk berdiri. Pada masa Airlangga mengambil alih kepemimpinan, Golkar berada dalam kondisi paling rentan dalam sejarah pasca-reformasi menghadapi krisis legitimasi akibat skandal korupsi e-KTP, sisa-sisa faksionalisme dari dualisme kepemimpinan, tekanan waktu yang sangat ketat menuju Pemilu 2019, dan kebutuhan menjaga stabilitas hubungan dengan kekuasaan.

Keberhasilan periode konsolidasi paling jelas tercermin pada dimensi Systemness. Temuan ini menempatkan Systemness Golkar pada level tinggi, dimana capaian paling kuat di antara keempat dimensi pelebagaan yang dianalisis. Mesin partai yang sebelumnya melemah berhasil dihidupkan kembali dari pusat hingga tingkat ranting, koordinasi antar level struktur meningkat secara signifikan, dan strategi revitalisasi jaringan organisasi Hasta Karya alih-alih membangun struktur baru terbukti sebagai keputusan yang efisien dalam memanfaatkan modal sosial yang telah terakumulasi selama puluhan tahun. Temuan ini dikonfirmasi secara independen baik dari perspektif internal partai maupun dari pengamatan lapangan eksternal, memberikan keyakinan yang tinggi terhadap validitas kesimpulan ini.

Kepemimpinan partai politik di Indonesia dapat sangat efektif dalam dimensi crisis management dan organizational survival tanpa harus mencapai transformasi nilai yang mendalam. Gaya kepemimpinan yang bersifat manajerial-stabilizing terbukti memadai untuk memulihkan stabilitas organisasi pasca-krisis dan memanfaatkan momentum eksternal secara maksimal, namun gaya kepemimpinan semacam ini memiliki keterbatasan struktural dalam

mendorong demokratisasi substantif dan otonomi institusional yang lebih mendalam. Temuan ini memperkaya literatur tentang kepemimpinan partai politik di negara demokrasi baru, khususnya dengan menunjukkan bahwa kombinasi kepemimpinan transformasional-transaksional Bass dapat menghasilkan pemulihan organisasional yang efektif pada satu dimensi pelembagaan, sembari secara bersamaan mempertahankan atau bahkan memperkuat kerentanan struktural pada dimensi pelembagaan yang lain.

Dengan demikian, strategi kepemimpinan Airlangga Hartarto berhasil meningkatkan perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2024 melalui kombinasi antara konsolidasi internal yang efektif sebagai prasyarat dasar, dan kapasitas organisasional yang memungkinkan partai memanfaatkan momentum politik eksternal secara maksimal. Namun keberhasilan ini, seberapa nyata dan terukur secara elektoral, belum mencerminkan transformasi pelembagaan partai yang mendalam dan mandiri. Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga berhasil pulih sebagai mesin elektoral yang solid, tetapi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi institusi politik yang otonom dan berbasis nilai dalam jangka panjang. Alih-alih mengurangi nilai dari pencapaian elektoral yang telah diraih, justru menempatkannya dalam perspektif yang lebih jujur dan realistis tentang sifat dan keberlanjutan keberhasilan tersebut ke depan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang dapat dipertimbangkan oleh Partai Golkar maupun pemangku kepentingan PEMILU secara lebih luas, terutama dalam menyikapi kerentanan struktural yang teridentifikasi pada dimensi Value Infusion dan Decisional Autonomy.

1. Bagi DPP Partai Golkar, penelitian ini merekomendasikan agar partai mulai membangun mekanisme demokratisasi internal yang lebih substantif, tidak hanya prosedural. Kemajuan yang telah dicapai melalui sistem seleksi caleg berbasis survei berlapis adalah fondasi yang baik, namun perlu diperluas ke ranah pengambilan keputusan strategis lainnya termasuk penentuan arah koalisi, penyusunan platform kebijakan, dan

promosi kader ke posisi-posisi kepemimpinan. Membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi kader di tingkat bawah dalam proses-proses ini, misalnya melalui forum konsultasi berjenjang atau mekanisme usulan dari DPD yang benar-benar dipertimbangkan di tingkat pusat, dapat menjadi langkah konkret untuk menggeser demokratisasi dari level prosedural ke level substantif.

2. Komitmen zero tolerance terhadap korupsi, disarankan agar partai memperkuat mekanisme pengawasan internal yang bersifat preventif, bukan hanya responsif. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik money politics di tingkat lapangan masih terjadi meskipun skalanya telah mengecil dibandingkan periode sebelumnya. Pembentukan unit pengawasan internal yang independen dari struktur kekuasaan partai, dengan kewenangan untuk melakukan audit terhadap praktik kampanye di tingkat dapil, dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dibandingkan sekadar penegakan citra melalui komunikasi publik.
3. Ketergantungan partai pada relasi dengan kekuasaan eksternal sebagai sumber kohesi internal, disarankan agar Golkar mulai mengembangkan basis kohesi alternatif yang tidak sepenuhnya bergantung pada akses kekuasaan. Pengembangan platform kebijakan yang lebih tegas dan dapat dibedakan dari partai-partai lain, serta penguatan identitas ideologis yang lebih jelas. Salah satu kelemahan partai dapat menjadi sumber kohesi baru yang lebih tahan terhadap perubahan konstelasi kekuasaan nasional.
4. Regenerasi kepemimpinan yang diakui masih menjadi pekerjaan rumah, penelitian ini menyarankan agar partai merancang jalur kaderisasi kepemimpinan nasional yang lebih sistematis dan transparan, tidak hanya regenerasi pada level kader dan calon legislatif. Keberhasilan menghadirkan figur-figur muda sebagai caleg perlu diiringi dengan jalur karir yang jelas bagi kader muda untuk mencapai posisi-posisi strategis di tingkat kepemimpinan nasional, agar regenerasi tidak berhenti pada level simbolis semata.
5. Bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kebijakan terkait regulasi kepartaian, temuan penelitian ini tentang persistensi money politics meskipun dalam skala yang menurun, menjadi catatan penting bagi

penguatan regulasi dan pengawasan pendanaan kampanye secara lebih luas tidak terbatas pada Partai Golkar semata, mengingat pola serupa kemungkinan juga terjadi di partai-partai lain dengan karakteristik organisasional yang sebanding.

6. Bagi partai politik lain yang menghadapi situasi krisis legitimasi serupa dengan yang dialami Golkar pada 2017, penelitian ini menawarkan model pembelajaran praktis tentang bagaimana kombinasi antara manajemen citra yang konsisten, mekanisme power-sharing untuk meredam faksionalisme, dan revitalisasi jaringan organisasi yang sudah ada dapat menjadi strategi pemulihan yang efektif dalam jangka waktu yang terbatas. Partai yang mempertimbangkan model ini juga perlu menyadari keterbatasannya bahwa strategi semacam ini efektif untuk organizational survival namun tidak secara otomatis menghasilkan transformasi nilai yang lebih mendalam, sehingga perlu diiringi dengan langkah-langkah tambahan jika tujuannya adalah pelebagaan yang lebih substantif dan berkelanjutan.

5.2.2 Saran Teoritis

Dari sisi akademis, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan sekaligus keterbatasan yang penting untuk disampaikan secara terbuka, sebagai dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengembangkan topik serupa. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur.

1. Proses triangulasi data antara perspektif internal dan eksternal tidak dapat dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data. Meskipun pada akhirnya data yang diperoleh menunjukkan konvergensi yang kuat dengan temuan dari narasumber eksternal termasuk pengakuan internal yang jujur tentang keterbatasan partai, keterbatasan waktu ini berarti penelitian tidak dapat melakukan iterasi pertanyaan lanjutan kepada narasumber eksternal berdasarkan temuan dari narasumber internal, yang seharusnya dapat memperkaya analisis lebih jauh.

2. Penelitian ini hanya melibatkan satu narasumber untuk masing-masing kategori perspektif satu narasumber internal partai, satu narasumber dari lembaga pemantau pemilu, dan satu narasumber akademisi. Meskipun ketiganya

memberikan data yang kaya dan kredibel berdasarkan posisi dan kapasitas masing-masing, generalisasi temuan akan lebih kuat apabila didukung oleh narasumber tambahan dalam setiap kategori, terutama untuk mengkonfirmasi apakah pandangan yang disampaikan mencerminkan konsensus yang lebih luas di kalangan masing-masing kelompok, atau sekadar pandangan individual yang mungkin tidak representatif.

3. Narasumber internal penelitian ini adalah figur yang menjabat baik di era Airlangga maupun era Bahlil, penelitian lanjutan yang secara khusus membandingkan kedua periode kepemimpinan tersebut terutama untuk menguji apakah kerentanan struktural yang teridentifikasi pada dimensi Decisional Autonomy dan Value Infusion mengalami perubahan signifikan pasca-transisi kepemimpinan akan memberikan kontribusi akademis yang berharga bagi pemahaman tentang keberlanjutan pelebagaan partai melewati pergantian figur pemimpin.

4. Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan kerangka teoritis tambahan, misalnya teori political opportunity structure secara lebih sistematis dan terukur sebagai konsep kualitatif yang muncul secara organik dalam wawancara, melainkan sebagai variabel yang diukur secara lebih eksplisit untuk memberikan estimasi yang lebih presisi tentang proporsi kontribusi faktor internal dibandingkan faktor eksternal terhadap hasil elektoral.